BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi digital dan industri kreatif di Indonesia menunjukkan pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) sebagai dasar bagi inovasi dan pertumbuhan sektor-sektor tersebut. Dalam konteks ini, pemahaman yang komprehensif mengenai kerangka hukum HKI di Indonesia menjadi sangat penting untuk memastikan perlindungan hak-hak kreatif dan memaksimalkan potensi ekonomi negara. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai regulasi dan praktik HKI di Indonesia menjadi perhatian utama yang sangat relevan dan mendesak.

Istilah Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat KI) atau yang dalam bahasa Inggrisnya dikenal sebagai *Intellectual Property* di Indonesia telah mengalami perkembangan terminologi yang signifikan sepanjang waktu. Awalnya, istilah *Intellectual Property* diterjemahkan sebagai "hak milik intelektual", kemudian mengalami perubahan menjadi "hak milik atas kekayaan intelektual", lalu berkembang menjadi "hak atas kekayaan intelektual - HAKI", dan kemudian berubah lagi menjadi "hak kekayaan intelektual" (disingkat HaKI, dan berubah

menjadi HKI). Saat ini, istilah yang digunakan adalah "Hak Kekayaan Intelektual" (HKI).¹

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan istilah yang sering digunakan untuk menyebut Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang merujuk pada hak-hak yang muncul dari hasil karya pikiran yang menghasilkan produk atau proses yang berguna bagi manusia. Secara pokok, HKI merupakan hak untuk memperoleh manfaat ekonomis dari kreativitas intelektual tertentu. Objek yang diatur dalam lingkup HKI meliputi berbagai karya yang timbul dari kemampuan intelektual manusia.²

Secara sederhana, hak kekayaan intelektual merupakan hak untuk mendapatkan perlindungan atas kekayaan intelektual yang dimiliki individu, kelompok, atau perusahaan. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan utama dari hak kekayaan intelektual untuk mendorong inovasi dan pengembangan kreativitas dalam masyarakat. Dengan demikian, hal ini mengisyaratkan bahwa masyarakat tidak perlu merasa khawatir untuk berinovasi atau mengembangkan kreativitas mereka sendiri, karena karya-karya dan temuan yang dihasilkan akan diberikan perlindungan melalui HKI.³ Cita Citrawinda dalam bukunya "Menegal Lebih Jauh Hak Kekayaan Intelektual" (2020) menyatakan bahwa HKI berfungsi

¹ Ni Ketut Suspati Dharmawan and Wayan Wiryan, *Hak Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta: Deepublish Group CV Budi Utama, 2012). hlm. 13.

² Nanda Dwi Rizkia and Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022). hlm. 15.

³ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). hlm. 39

sebagai bentuk penghargaan dan pengakuan terhadap karya atau kreativitas individu.⁴

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kemajuan ekonomi baik di tingkat nasional maupun internasional. Informasi mengenai kebijakan, regulasi, perkembangan terbaru dalam penerapan dan perlindungan HKI telah menjadi sangat penting bagi masyarakat.⁵ Merek merupakan hasil dari kemampuan dan kecerdasan manusia yang bisa berupa penemuan atau penciptaan. Karena alasan ini, merek termasuk dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights*.⁶

Merek merupakan lambang yang membedakan produk yang diproduksi oleh individu atau entitas hukum tertentu dari produk yang dihasilkan oleh pihak lain. Fungsi utama merek untuk membantu konsumen mengidentifikasi suatu produk dan membedakannya dari produk serupa atau mirip yang diproduksi oleh pesaing. Konsumen yang puas dengan produk yang memiliki merek tertentu cenderung akan memilih produk lain yang bermerek sama di masa depan.⁷

Karena peran merek sangat vital, perlindungan hukum telah diberlakukan terhadap merek, yang mencakup hak-hak individu atau badan hukum terkait.

⁴ Cita Citrawinda, *Mengenal Lebih Jauh Hak Kekayaan Intelektual* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020). hlm. 23.

⁵ Ninik Ayuhandika, Rendie Meita Sarie Putri, and Amara Yovitasari, "Putusan Hakim Dalam Memutus Perkara Perdata Khusus Hak Kekayaan Intelektual Bagi Pemegang Hak Merek," *Jurnal Panorama Hukum* 8, no. 2 (2023), hlm. 165.

⁶ Hariyani Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010). hlm. 16.

⁷ Tommy Hendra Purwaka, *Perlindungan Merek* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017). hlm. 13.

Definisi merek secara resmi diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyebutkan bahwa:

“Merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis membedakan jenis merek menjadi tiga (3), yakni:

1. Merek dagang merupakan merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.
2. Merek jasa merupakan merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.
3. Merek kolektif merupakan merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/ atau jasa sejenis lainnya.

Hak atas merek merupakan hak khusus yang diberikan oleh negara kepada pemiliknya untuk menggunakan merek tersebut sendiri atau memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakannya. Mekanisme pendaftaran merek diperlukan untuk memperoleh hak khusus tersebut dari negara. Pendaftaran merek

di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tepatnya dalam Pasal 20, 21, 22. Tujuan dari perlindungan hukum terhadap hak merek untuk melindungi kepemilikan merek dan mencegah produk palsu yang dapat merugikan penciptanya. Perlindungan hak merek dapat diperoleh melalui pendaftaran merek. Pendaftaran merek dapat dilakukan melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Kepemilikan hak atas merek telah mendorong individu dan perusahaan untuk memproduksi *merchandise* resmi yang berkualitas tinggi, seperti pakaian, aksesoris, dan perangkat lainnya yang secara resmi menggunakan merek tersebut. Salah satu bentuk usaha dari grup musik populer telah melampaui batas panggung dengan merilis berbagai jenis *merchandise* yang menarik. Dari kaos, jaket, hingga barang-barang koleksi yang langka, setiap item dihiasi dengan logo khas grup dan desain yang mencerminkan gaya mereka. Penggemar loyal tidak hanya membeli *merchandise* ini sebagai dukungan kepada grup, tetapi juga sebagai cara untuk mengekspresikan identitas dan kecintaan mereka terhadap musik dan budaya yang diperjuangkan oleh grup tersebut. Melalui *merchandise* ini, grup musik berhasil membangun hubungan yang erat dengan penggemar, menciptakan komunitas yang solid dan bersemangat di sekitar mereka.

Adapun salah satu grup musik di Indonesia yakni grup musik Koil. Koil merupakan grup musik yang memiliki aliran musik *Industrial Rock*. Grup musik yang berbasis di Bandung dan memulai perjalanannya pada tahun 1993. Sejak awal, Koil dikenal sebagai sebuah band yang profesional meskipun masih baru. Para anggota Koil menunjukkan profesionalitas dengan memilih untuk

memainkan lagu-lagu buatan sendiri saat tampil di atas panggung.⁸ Mengawali perjalanan musiknya sejak tahun 1993 hingga kini, Koil telah menghasilkan sejumlah karya berupa enam (6) album dan beberapa *single*. Koil tetap solid dengan formasi personelnya yang terdiri dari J.A Verdijantoro alias Otong Koil (vokal), Donnyantoro alias Doni Koil (gitar), Leon Ray Legoh alias Leon (drum), dan F.X. Adam Joswara alias Vladvamp (bass, *synthesizer*).⁹ Koil menjadi salah satu grup musik legendaris asal Kota Bandung yang telah bertahan sejak tahun 1993 hingga saat ini.

Grup musik Koil merilis materi rekaman pertama mereka, sebuah demo mini album yang berjudul “*From Nowhere*” pada tahun 1994. Kemudian, Koil mulai merekam album pertama mereka yang dirilis pada bulan September 1996. Sebagian besar lagu dalam album tersebut diambil dari demo mini album sebelumnya “*From Nowhere*”. Pada tahun 1997, kemitraan Koil dengan Project Q berakhir. Mereka memutuskan untuk melanjutkan karier mereka dengan merilis *single* “Kesepian Ini Abadi” melalui label Apocalypse, rekaman mereka sendiri. Label ini didirikan oleh Otong dan Adam. Pada periode ini, grup musik yang mengubah panggung pertunjukan mereka juga menciptakan konsep baru dalam hal mode. Penggunaan pakaian kulit yang disesuaikan, dominasi warna hitam, aksesoris logam, sepatu bot

⁸ SuperLive, “Perjalanan Koil Di Industri Musik Tanah Air,” superlive.id, 2020, Melalui: <<https://superlive.id/supermusic/artikel/super-buzz/memantau-sepak-terjang-koil-di-industri-musik-indonesia>.> di akses pada tanggal 26 April 2024.

⁹ Faisal Rahman, Siti Desintha, and Arry Mustikawan, “Perancangan Buku ‘Blacklight’ Band Koil,” *E-Proceeding of Art & Design* 10, no. 6 (2023): hlm. 8544.

tinggi, dan unsur-unsur lain yang umumnya terkait dengan industri *gothic* menjadi bagian penting dari penampilan baru grup musik tersebut.¹⁰

Pada bulan Februari 2001, Koil meluncurkan album keduanya yang bertajuk *Megaloblast*. Mereka juga menciptakan video untuk lagu tunggal "Mendekati Surga". Album ini mendapat rilis kembali pada bulan Desember 2003. Untuk mempromosikan karya ini, Koil membuat dua video klip, yaitu "Kita Dapat Diselamatkan" dan "Dosa Ini Tak Akan Berhenti". Tahun 2005, band ini merilis dua single dengan judul "Hiburan Ringan Bagian I" dan "Hiburan Ringan Bagian II", yang juga menjadi bagian dari album *soundtrack* film horor bernama *12:00 AM*. Pada tahun 2007, Koil mengeluarkan album ketiganya yang diberi judul *Blacklight Shines On*. Album ini tersedia dalam format digital dan dapat diunduh secara gratis. Salah satu lagu dalam album ini, "Semoga Kau Sembuh Bagian II", kemudian dijadikan video klip oleh sutradara Rizal Mantovani untuk menjadi bagian dari *soundtrack* film horor yang berjudul *Kuntilanak*. Tiga tahun kemudian, pada bulan Maret 2010, Koil mengeluarkan album *Blacklight*. Gangguan berbau mistis yang kuat yang menyertai perjalanan grup musik ini mengakibatkan terhambatnya produktivitas mereka dalam memproduksi album.¹¹

Setelah hampir 10 tahun (sepuluh tahun) berlalu, pada bulan Oktober 2019 di bawah naungan Grimloc Records. Dalam tiga tahun terakhir, Koil telah

¹⁰ Loetju Media, "Profile, Personel Dan Daftar Lagu Band Indie KOIL Asal Indonesia," Loetju.id, 2023, Melalui: <<https://www.loetju.id/2023/10/profile-personel-dan-daftar-lagu-band.html>> di akses pada tanggal 29 April 2024.

¹¹ Addy Gembel, "Koil Diseret Ke Pengadilan, Tersandung Kasus Album Yang Rilis 11 Tahun Lalu," dcdc.id, 2021, Melalui: <<https://www.dcdc.id/coklatnews/koil-diseret-ke-pengadilan-tersandung-kasus-album-yang-rilis-11-tahun-lalu>> di akses pada tanggal 1 Mei 2024.

menciptakan beberapa karya monumental. Mereka merilis album baru yang sangat dinanti-nantikan, *Blacklight*, kemudian merekam ulang lagu klasik mereka dalam *EP/re-recording* "Lagu Hujan", dan juga menghasilkan *remix* "Tangga Pelangi" oleh Vladvamp (*bassist/synthesizer* Koil), yang tersedia dalam format piringan hitam 7 inci (dari Grimloc Records) dan digital.¹² Tak hanya itu, pada tahun 2023 Koil juga merilis *single* mereka yang berjudul "Pecandu Narkotbah". Dengan demikian, kehadiran lagu "Pecandu Narkotbah" adalah bukti serta jawaban atas banyak pertanyaan dari penggemar dan masyarakat umum tentang posisi Koil dalam kancah musik nasional. Kreativitas musik Koil tetap segar dan kuat meskipun telah berjalan cukup lama, menunjukkan bahwa eksistensi mereka dalam industri musik masih sangat relevan.

Koil saat ini cukup digandrungi dan memiliki popularitas yang baik, ditandai dengan pengikutnya di *platform* Instagram dengan *username* @koilofficial sebanyak 66.000 (enam puluh enam ribu) pengikut per tanggal 7 Februari 2025. Adapun pendengar musik Koil pun terhitung banyak di salah satu *platform* musik yaitu Spotify sebanyak 102.600 (seratus dua ribu enam ratus) pendengar bulanan per tanggal 7 Februari 2025. Akun YouTube resmi Koil dengan *username* @mitraiblis juga memiliki *subscribers* sebanyak 12.200 (dua belas ribu dua ratus) per tanggal 7 Februari 2025. Adapun akun TikTok Koil dengan *username* @officialkoil memiliki jumlah pengikut sebanyak 31.600 (tiga puluh satu ribu enam ratus) per tanggal 7 Februari 2025. Selain itu Koil kerap kali bermusik dari

¹² Fransiscus Eko, "Jelang Album Ke 4, KOIL Luncurkan Lagu Baru Berjudul 'Pecandu Narkotbah,'" musikplus.id, 2023, Melalui: <<https://musikplus.id/news/jelang-album-ke-4-koil-luncurkan-lagu-baru-berjudul-pecandu-narkotbah/>> di akses pada tanggal 1 Mei 2024.

satu daerah ke daerah lainnya melalui festival musik atau konser kolektif. Karena memiliki target konsumen yang banyak ini, Koil meluncurkan *merchandise* sebagai salah satu bentuk karyanya selain musik dan juga untuk memperluas jangkauan merek mereka, meningkatkan keterlibatan penggemar, dan juga sebagai sumber pendapatan tambahan.

Meski perjalanan mereka tidak bisa dibilang mulus pada awal-awal karir bermusiknya, kini mereka telah berhasil mengibarkan namanya di belantika musik tanah air. Dengan meningkatnya popularitas ini, permintaan dari penggemar grup musik Koil akan *merchandise* grup musik Koil pun meningkat. *Merchandise* yang dimaksud berupa kaos resmi yang diproduksi oleh grup musik tersebut.¹³ *Merchandise* tersebut bersifat resmi dan memiliki hak merek karena telah di daftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor Registrasi IDM000314899 dengan kode kelas 25 yakni dengan lingkup jenis barang pakaian jadi (*ready-made clothing*), sandal, tutup kepala (*headgear for wear*). Dalam pendaftaran tersebut yang menjadi pemegang hak mereknya adalah Donnyantoro, dimana beliau adalah gitaris dari grup musik Koil. Dengan tanggal perlindungan dimulai 17 Februari 2010 hingga 17 Februari 2030. Maka Koil adalah suatu merek terdaftar yang dimiliki oleh grup musik Koil beserta hak eksklusif di dalamnya.

Merchandise pada dasarnya merupakan karya orisinal dan otentik yang dimiliki oleh grup musik atau musisi. Biasanya, *merchandise* yang dikeluarkan oleh

¹³ Putri Zafira Iskandar and Dinda Amanda Zuliestiana, "Pengaruh Faktor Perilaku Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Album Musik Atau Merchandise Kpop (Studi Pada Penggemar Musik Kpop)," *EProceedings of Management* 8, no. 3 (2021), hlm. 34.

grup musik atau musisi memiliki kaitan dengan musik yang dibawakan oleh grup musik atau musisi tersebut. Namun, pada kenyataannya, kini mulai banyak orang-orang yang memalsukan *merchandise* dari berbagai grup musik atau musisi dan ironisnya, *merchandise* palsu tersebut diperjualbelikan bebas. Istilah "*bootleg*" merujuk pada barang-barang tiruan atau palsu, sering digunakan oleh kolektor untuk membedakan barang asli dan tiruan di pasaran.¹⁴ Kemunculan *merchandise bootleg* bisa dipicu oleh beberapa faktor, seperti harga yang tinggi dari *official merchandise*, sulitnya mendapatkan akses untuk membeli produk aslinya, dan juga karena grup musik tersebut menjadi terlalu populer, sehingga akhirnya ditiru. *Merchandise* bajakan atau bootleg yang berupa kaos masih terus beredar luas di pasar hingga saat ini, dengan harga yang lebih rendah dan hanya menguntungkan pembajaknya saja. Mereka tidak mengajukan izin atau memberikan royalti apapun untuk produk yang mereka jual secara ilegal.¹⁵

Meskipun harga *merchandise* resmi dari grup musik atau musisi sering mencapai ratusan ribu bahkan jutaan rupiah, sementara kaos *bootleg* bisa dibeli dengan harga puluhan ribu saja. *Merchandise* resmi memiliki harga yang tinggi karena stoknya terbatas, desainnya asli, dan menawarkan eksklusivitas yang tak ternilai. Oleh karena itu, menggunakan kaos *bootleg* bukan suatu bentuk dukungan yang benar terhadap grup musik atau musisi, melainkan tidak menghargai hasil karya grup musik atau musisi tersebut. Bagi grup musik baru atau dengan anggota

¹⁴ Andika Prasetyo, "Fenomena Kaos Band Di Indonesia, Garis Buram Antara Asli Dan Palsu," hypeabis.id, 2023, Melalui: <<https://hypeabis.id/read/30541/fenomena-kaos-band-di-indonesia-garis-buram-antara-asli-dan-palsu>> di akses pada tanggal 2 Mei 2024.

¹⁵ Yudistira Wiranata, "Beli Kaos Bootleg, Boleh Gak Sih?," cl-ue.media, 2023, Melalui: <<https://cl-ue.media/2023/10/beli-kaos-bootleg-boleh-gak-sih/>> di akses pada tanggal 2 Mei 2024.

yang banyak, dampaknya bisa sangat signifikan karena sebagian besar dari hasil penjualan *merchandise* bajakan itu tidak akan masuk ke kantong para grup musik atau musisi terkait. Umumnya, sekarang ini pendapatan para musisi atau grup musik berasal tidak hanya dari konser atau panggung, tetapi juga dari penjualan *merchandise*.

Penjualan *merchandise* dari grup musik palsu tidak hanya terjadi pada pasar konvensional, akan tetapi juga melalui perdagangan elektronik pada berbagai lokapasar. Dampak digitalisasi telah merambah ke berbagai belahan dunia dengan semakin meluas, terutama setelah pandemi melanda pada akhir tahun 2019. Situasi ini menyebabkan pergeseran dari aktivitas konvensional yang dilakukan secara fisik (*offline*) menjadi lebih tergantung pada teknologi (*online*).¹⁶ Lokapasar (*marketplace*) adalah bentuk inovasi dalam perdagangan yang memudahkan konsumen untuk mencari, memesan, dan membeli barang yang mereka butuhkan tanpa harus pergi ke toko fisik. Di dalam lokapasar ini, terdapat berbagai *platform* yang memungkinkan para pelaku usaha bergabung dan memasarkan produk mereka. Beberapa contohnya adalah Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Blibli, dan JD.ID yang berfungsi sebagai sarana promosi bagi penjual.¹⁷

Walaupun penjualan *merchandise* grup musik palsu ini melalui perdagangan elektronik namun tetap memiliki kekuatan hukum, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

¹⁶ Sri Handayani Marwan, *Tantangan Dan Peluang Generasi Milenial Era Pandemi* (Surabaya: UNISRI Press, 2021). hlm. 4.

¹⁷ Ana Ramadhayanti, "Pengaruh Komunikasi Pemasaran Dan Affiliate Marketing Terhadap Volume Penjualan," *Jurnal Komunikasi, Bisnis Dan Manajemen* 8, no. 1 (2021), hlm. 95.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa:

“Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”

Tabel 1: Sampel Data Penjualan Kaos Palsu Koil di Berbagai Lokapasar

Tahun Terjadinya	Lokapasar	Nama Toko	Harga	Total Penjualan	Perkiraan Kerugian	Tautan
2022-2025	Shopee	Syndicate13	Rp. 79.500,00	279 buah	Rp. 22.180.500,00	https://id.shopee.com/JEX1Y7
2022-2025	Shopee	rockstar.merch	Rp. 83.000,00	103 buah	Rp. 8.549.000,00	https://id.shopee.com/SQXxwtN
2022-2025	Shopee	mfc1ths.id	Rp. 95.500,00	152 buah	Rp. 14.516.000,00	https://id.shopee.com/j1uRmDq
2022-2025	Shopee	mengxie	Rp. 94.000,00	113 buah	Rp. 10.622.000,00	https://id.shopee.com/3CsQLm6
2022-2025	Tokopedia	rocknroll_id	Rp. 120.000,00	23 buah	Rp. 2.760.000,00	https://tokopedia.link/

						QAJcg9L3NMb
2022-2025	Lazada	Mytees13	Rp. 69.000,00	30 buah	Rp. 2.070.000,00	https://s.lazada.co.id/s.tpUf8

Sumber: Shopee, Tokopedia, Lazada

Maraknya pemalsuan *merchandise* grup musik Koil dapat terlihat di salah satu lokapasar terkenal dengan pengguna terbanyak di Indonesia, yaitu Shopee. Hal ini dapat dilihat dari data diatas, salah satu toko penjual di Shopee yang bernama Syndicate13, toko tersebut menjual *merchandise* grup musik koil sebagai salah satu dagangannya. *Merchandise* yang dijual diindikasikan palsu, hal ini bisa dilihat dari kolom *review* pada katalog penjualan tersebut dan juga harga yang murah yakni Rp. 79.500,00 (tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) untuk satu kaos palsu Koil. Walaupun diindikasikan sebagai *merchandise* palsu, namun penjualannya dapat terhitung banyak yaitu sebanyak 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) buah kaos terjual per tanggal 7 Februari 2025. Selain toko tersebut ada toko lainnya yang menjual barang serupa, toko tersebut bernama mengxie, toko tersebut menjual kaos palsu Koil dengan harga Rp. 94.000,00 (sembilan puluh empat ribu rupiah) untuk satu kaos dengan penjualan sebanyak 113 (seratus tiga belas) buah per tanggal 7 Februari 2025. Adapun toko lainnya yang bernama mfc1ths.id menjual kaos yang diindikasikan palsu dengan harga Rp. 95.500,00 (sembilan puluh lima ribu lima ratus ribu) dengan total terjual sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) buah kaos per tanggal 7 Februari 2025.

Selain lokapasar Shopee, adapun salah satu lokapasar di Indonesia yakni Tokopedia. Pada lokapasar Tokopedia juga terdapat beberapa toko yang menjual kaos palsu grup musik Koil. Seperti pada toko yang bernama rocknroll_id, toko tersebut menjual kaos palsu grup musik Koil dengan harga Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per satu kaos dengan penjualan sebanyak 23 (dua puluh tiga) kaos per tanggal 7 Februari 2025. Adapun lokapasar lain yaitu Lazada, pada Lazada juga terdapat banyak sekali toko yang menjual kaos palsu grup musik Koil, salah satunya pada toko yang bernama mytees13, pada toko tersebut kaos palsu grup musik Koil di bandrol dengan harga Rp. 69.000,00 (enam puluh sembilan ribu) per kaos dengan penjualan 30 (tiga puluh) kaos per tanggal 7 Februari 2025. Dari data-data di atas dapat terlihat total perkiraan kerugian yang didapat oleh Band Koil dari penjualan kaos palsu diberbagai lokapasar bernilai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Maka dari itu dapat membuktikan bahwa lokapasar merupakan media penjualan *merchandise* palsu dari grup musik Koil.

Koil sendiri memasarkan *official merchandisenya* melalui perdagangan elektronik pada berbagai lokapasar, antara lain Shopee dan Tokopedia dengan nama toko godincorporated, hal ini dapat terlihat dari akun Instagram resminya yang mana Koil mencantumkan tautan untuk mengakses toko resminya pada lokapasar. Sedangkan Koil sendiri membandrol kaos resmi nya dengan harga Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) hingga Rp. 255.000,00, (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah). Jika dibandingkan dengan kaos palsu, harganya bisa berkali lipat.

Demikian merek pada *merchandise* memiliki peran yang sangat vital. Ketika pelanggaran terhadap merek tersebut semakin banyak terjadi, perlindungan hukum

yang tegas dan jelas menjadi semakin penting. Perlindungan hukum ini diberikan kepada pemilik merek sebagai pengusaha sekaligus produsen merek yang hak-haknya dilanggar melalui tindakan pembajakan, pemalsuan, atau peniruan merek dagang.

Berkenaan dengan permasalahan yang telah dijelaskan dalam latar belakang, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK MEREK AKIBAT PEMALSUAN *MERCHANDISE* GRUP MUSIK KOIL PADA LOKAPASAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis merumuskan masalah menjadi beberapa, diantaranya:

1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek akibat pemalsuan *merchandise* grup musik Koil pada lokapasar berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimana kendala hukum perlindungan hak merek *merchandise* grup musik Koil pada lokapasar?
3. Bagaimana upaya hukum untuk mengatasi kendala atas pelanggaran hak merek pemalsuan *merchandise* grup musik Koil pada lokapasar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian yang akan dilaksanakan yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek akibat pemalsuan *merchandise* grup musik Koil pada lokapasar berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Untuk mengetahui kendala hukum perlindungan hak merek *merchandise* grup musik Koil.
3. Untuk mengetahui upaya hukum atas pelanggaran hak merek pemalsuan *merchandise* grup musik Koil.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini yakni bermanfaat pada dua (2) aspek, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum yang mengatur hak merek, khususnya dalam hal melindungi hak pemilik merek dari pemalsuan *merchandise* resmi tanpa izin berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada peneliti dengan memberikan informasi tentang pentingnya kesadaran akan hak merek terutama terkait *merchandise*, sehingga masyarakat sebagai pembeli merek tidak sembarangan membeli *merchandise* palsu yang dibajak oleh pihak lain.

b. Bagi Pemegang Hak Merek

Diharapkan bahwa temuan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada pemegang hak merek dengan memberikan pengetahuan dan wawasan tentang perlindungan hukum bagi pemegang merek dan juga panduan tentang tindakan hukum yang dapat diambil ketika terjadi pemalsuan suatu merek.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya para konsumen, tentang pentingnya menghormati hak merek dan menghindari pemalsuan *merchandise* resmi. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang implikasi hukum dari tindakan pemalsuan, konsumen dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dalam membeli barang-barang yang resmi dan mendukung karya orisinal.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan beberapa teori yang akan membantu mengarahkan pemikiran peneliti dalam proses penelitian. Teori-teori yang digunakan meliputi teori kepastian hukum, teori hak milik dan teori perlindungan hukum.

1. Teori Kepastian Hukum (*Grand Theory*)

Sejalan dengan Pasal 1 (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Maka kepastian merujuk pada situasi yang jelas dan tegas, serta keberadaan aturan atau keputusan yang telah ditetapkan. Hukum haruslah konsisten dan adil secara esensial. Hanya melalui keadilan dan konsistensi tersebut, hukum dapat menjalankan perannya secara efektif. Kepastian hukum lebih bersifat normatif daripada sosiologis, yang berarti bahwa penyelesaiannya lebih bergantung pada prinsip-prinsip hukum daripada penjelasan empiris tentang masyarakat atau perilaku manusia.

Menurut Kelsen, hukum dapat dianggap sebagai sebuah sistem norma. Norma-norma ini menggambarkan apa yang seharusnya dilakukan, menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan memuat beberapa peraturan tentang tindakan yang harus diambil. Norma-norma ini merupakan hasil dari tindakan manusia yang dipertimbangkan secara seksama. Undang-undang yang berisi aturan-aturan umum menjadi panduan bagi individu dalam berinteraksi dalam masyarakat, baik itu dengan individu lain maupun dengan masyarakat secara keseluruhan. Aturan-aturan tersebut menetapkan batasan bagi perilaku masyarakat terhadap individu, sehingga menciptakan kepastian hukum melalui penerapannya.¹⁸

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008). hlm. 158.

Menurut Utrecht, konsep kepastian hukum memiliki dua dimensi. Pertama, keberadaan aturan yang bersifat umum memungkinkan individu mengetahui tindakan apa yang diperbolehkan atau dilarang dilakukannya. Kedua, kepastian hukum juga mencakup jaminan keamanan bagi individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Dengan adanya aturan yang bersifat umum, individu dapat mengetahui batasan-batasan yang dapat dikenakan atau dilakukan oleh negara terhadap mereka.¹⁹

Kepastian hukum menyiratkan keyakinan akan adanya hukum yang mencakup prinsip keadilan. Norma-norma yang mengedepankan keadilan harus efektif sebagai peraturan yang diikuti. Menurut Gustav Radbruch, keadilan dan kepastian hukum adalah elemen esensial dalam hukum, dan ia menekankan pentingnya memperhatikan keduanya. Radbruch berargumen bahwa kepastian hukum harus dipertahankan untuk menjaga keamanan dan ketertiban suatu negara. Maka hukum positif harus senantiasa dihormati. Prinsip-prinsip kepastian hukum dan aspirasi nilai-nilai seperti keadilan dan kebahagiaan menjadi dasar bagi teori tersebut.²⁰

Berdasarkan teori kepastian hukum, perlindungan terhadap pemegang hak merek seharusnya ditegakkan melalui mekanisme hukum yang pasti, jelas, dan konsisten. Dalam konteks pemalsuan *merchandise* grup musik Koil di lokapasar, analisis menunjukkan bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis belum sepenuhnya

¹⁹ Cst Kansil et al., *Kamus Istilah Hukum* (Jakarta, 2009). hlm. 385.

²⁰ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)* (Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002). hlm. 95.

memberikan perlindungan yang tegas dan efektif, terutama karena lemahnya pengawasan dan lambannya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran. Hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi pemilik merek dalam menuntut haknya dan mengurangi kepercayaan terhadap sistem hukum.

2. Teori Hak Milik (*Middle Theory*)

Hukum pada dasarnya harus memastikan kesejahteraan masyarakat, dengan fokus pada memajukan kesejahteraan ekonomi individu. Dalam pandangan J. M. Keynes, negara kesejahteraan atau welfare state adalah negara di mana pemerintah menjamin kesejahteraan rakyat.²¹

Oleh karena itu, para pencipta karya intelektual perlu dilindungi oleh hukum. Konsep ini juga diperkuat oleh John Locke dalam teori *Property Rights*, di mana ia menyatakan bahwa pencipta memiliki hak moral dan hak ekonomi untuk menikmati hasil karyanya, termasuk manfaat ekonomi yang berasal dari keahliannya. Selain itu, karena pencipta telah memperkaya masyarakat melalui karyanya, mereka berhak mendapatkan imbalan yang sepadan dengan nilai kontribusinya. Oleh karena itu, hak cipta memberikan hak milik eksklusif atas karya pencipta, yang mengakui hak alami individu untuk mengendalikan karyanya dan menerima imbalan yang adil atas kontribusinya kepada masyarakat.²²

²¹ Moh. Kusnardi and Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, 1988). hlm. 153

²² Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik Atau Lagu* (Jakarta: UI Press, 2003). hlm. 19

Teori yang dipergunakan sebagai alat analisis untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah teori hak kepemilikan, atau sering disebut sebagai *Property Rights*. Konsep kepemilikan, baik dalam konteks kepemilikan individual maupun kepemilikan bersama, telah diajukan oleh John Locke. Locke berpendapat bahwa bumi diberikan oleh Tuhan kepada semua manusia secara merata untuk mendukung kehidupan manusia. Locke menyatakan bahwa hak kepemilikan muncul ketika seseorang berusaha memanfaatkan sumber daya, yang disebutnya sebagai "kerja" tubuh dan "usaha" tangan, yang berarti melakukan usaha fisik dan menghasilkan karya dari kerja tersebut.²³

Teori Locke mengenai kepemilikan barang tersebut sejalan dengan masyarakat Barat yang cenderung individualis, yang menjadi dasar bagi konsep Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Perkembangan konsep hak milik atas karya-karya intelektual akhirnya menimbulkan kebutuhan untuk melindungi atau mempertahankannya dari tindakan orang lain.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (5) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis tersebut, hak-hak pemilik merek Koil seharusnya sudah terlindungi secara hukum. Kebutuhan ini kemudian menghasilkan konsep perlindungan hukum atas karya-karya

²³ Ridwan, *Hak Milik: Perspektif Islam, Kapitalis, Dan Sosialis* (Purwokerto: Stain Press, 2010). hlm. 112.

intelektual tersebut. Dengan demikian, ini merupakan perkembangan masuknya HKI ke dalam sistem hukum.²⁴

Adapun Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, menyatakan bahwa:

"Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya."

Walaupun penjualan *merchandise* grup musik palsu ini melalui perdagangan elektronik namun tetap memiliki kekuatan hukum, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa:

"Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya".

3. Teori Perlindungan Hukum (*Applied Theory*)

Penegakan hukum dan pencapaian keadilan harus didasarkan pada logika yang tepat, dengan menggunakan bukti dan barang bukti untuk mewujudkan keadilan hukum. Keputusan hukum harus didasarkan pada pertimbangan etis tentang keadilan suatu kasus. Persoalan hukum menjadi relevan ketika aparat hukum menjalankan tugas mereka dengan efektif dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan, sehingga tidak ada penyalahgunaan aturan atau hukum yang

²⁴ Abdul Latif Mahfuz, "Problematik Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Di Indonesia," *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): hlm. 50–51.

terjadi secara tidak teratur. Ini berarti menerapkan pengkodean dan penyatuan hukum untuk menjamin kepastian dan keadilan hukum.²⁵

Pasal 574 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) mengatakan:

“Tiap-tiap pemilik suatu benda berhak menuntut kepada siapapun juga yang menguasainya akan pengembalian benda itu dalam keadaan beradanya”.

Selain itu Pasal 29 ayat (1) Undang-undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa:

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”.

Maka dari itu perlindungan hukum adalah pondasi utama dalam memastikan keadilan dan keamanan bagi setiap individu dalam suatu masyarakat.

Asal mula teori perlindungan hukum berasal dari teori hukum alam atau aliran hukum alam, sebagaimana dijelaskan oleh Fitzgerald sebagaimana dikutip oleh Satjipto Raharjo. Aliran ini diperkenalkan oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno. Menurut aliran hukum alam, hukum berasal dari Tuhan dan memiliki karakteristik universal dan abadi. Selain itu, aliran ini menegaskan bahwa hukum dan moral tidak dapat dipisahkan. Para pendukung aliran ini percaya

²⁵ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). hlm. 43.

bahwa hukum dan moral mencerminkan aturan internal dan eksternal kehidupan manusia yang diimplementasikan melalui hukum dan moral.²⁶

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) yang telah dirugikan oleh orang lain. Perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati seluruh hak yang diberikan oleh hukum. Secara lebih spesifik, perlindungan hukum mencakup serangkaian tindakan hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara mental maupun fisik, dari gangguan dan ancaman yang berasal dari berbagai pihak. Selain itu, hukum dapat dimanfaatkan untuk menciptakan perlindungan yang tidak hanya responsif dan fleksibel, tetapi juga proaktif.²⁷

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah mekanisme yang menjaga subjek-subjek hukum melalui regulasi hukum yang diberlakukan dan penegakan aturan tersebut dengan sanksi. Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu;²⁸

- a. Perlindungan hukum preventif, perlindungan yang disediakan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah pelanggaran sebelum terjadi, tercantum dalam peraturan hukum dengan maksud untuk mencegah

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000). hlm. 53.

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 71.

²⁸ Muchsin, *Hukum Dan Kebijakan Publik* (Surabaya: Averroes Press, 2002). hlm. 45.

pelanggaran tertentu dan memberikan pedoman atau batasan dalam memenuhi suatu kewajiban.

Perlindungan hukum represif, perlindungan akhir yang melibatkan sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang dikenakan setelah terjadinya sengketa atau pelanggaran. Fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia menuntut pelaksanaannya dilakukan dengan profesional. Implementasi hukum harus berjalan dalam suasana yang normal, damai, dan tertib. Kepastian dan perlindungan hukum memberikan rasa aman dan kedamaian kepada masyarakat. Perlindungan hukum mencakup upaya untuk menjaga martabat manusia dan mengakui hak asasi manusia di ranah hukum. Dengan demikian, keberadaan perlindungan hukum memberikan manfaat bagi individu dengan mencapai tujuan hukum secara umum, seperti menciptakan ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, perdamaian, kebenaran, dan keadilan.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian dimulai dengan melakukan analisis terlebih dahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dikerjakan, agar mempunyai rujukan ilmiah pendukung serta pelengkap yang mencukupi. Pendekatan dilakukan untuk menghormati penelitian terdahulu, baik permasalahan maupun perbedaan dalam penelitian adalah hal umum yang terjadi dan keduanya dapat melengkapi satu sama lain. Adapun tinjauan pustaka yang menjadi gambaran penulis dalam penelitian yang akan dilaksanakan, yaitu:

Tabel 2: Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis	Judul	Persamaan dan Perbedaan Dengan Penelitian
1.	Dima Khoirunnisa (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024). ²⁹	Perlindungan Hukum Terhadap Merek Obat Cina Atas Kesamaan Pada Pokoknya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Putusan Nomor 55/Pdt.Sus-Merek/2020/Pn Niaga.Jkt.Pst	Penelitian ini membahas suatu putusan dari sengketa atas kesamaan merek obat Cina yakni lukisan milik Zhe Nung Zhu dijiplak oleh You Wang She Ol Tian You. Sedangkan, peneliti membahas mengenai pemalsuan <i>merchandise</i> dari grup musik Koil oleh pihak lain dalam perdagangan elektronik pada berbagai lokapasar.
2.	Desi Fitriana Rizky Permata Sari	Perlindungan Hukum bagi Pemegang Merek atas Pemalsuan Sepatu "Ortuseight" Berdasarkan Undang-undang Nomor	Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek atas pemalsuan sepatu merek Ortuseight oleh

²⁹ Dima Khoirunnisa, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Obat Cina Atas Kesamaan Pada Pokoknya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Putusan Nomor 55/Pdt.Sus-Merek/2020/Pn Niaga.Jkt.Pst, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024.)* Melalui: https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/77143/1/DIMA_KHOIRUNNISA_-_FSH.pdf.

	(Universitas Pelita Harapan, 2023). ³⁰	20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Sedangkan penulis meneliti tindakan pemalsuan <i>merchandise</i> Koil dan bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak merek terkait.
3.	Oliver Gultom (Universitas Pelita Harapan, 2023). ³¹	Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Terkenal di Luar Negeri atas Penggunaan Merek “100%” Sama di Indonesia (studi putusan no 22/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN.Niaga. Jkt.Pst)	Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek di luar negeri atas penggunaan merek “100%” sama di Indonesia. Sedangkan penulis meneliti perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek akibat pemalsuan <i>merchandise</i> grup musik Koil oleh pihak lain.

³⁰ Desi Fitriana Rizky Permata Sari, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Atas Pemalsuan Sepatu “Ortuseight” Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis* (Skripsi, Universitas Pelita Harapan, 2023), Melalui: <<https://repository.uph.edu/id/eprint/60553/1/Title.pdf>.>

³¹ Oliver Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Terkenal Di Luar Negeri Atas Penggunaan Merek “100%” Sama Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 22/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst)* (Skripsi, Universitas Pelita Harapan, 2023), Melalui: <<https://repository.uph.edu/id/eprint/57695/2/Abstract.pdf>.>

4.	Ona Nalea (Universitas Islam Kalimantan, 2024). ³²	Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Hak-Hak Penerima Lisensi Merek	Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hak-hak bagi penerima lisensi merek. Sedangkan penulis meneliti mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek akibat pemalsuan <i>merchandise</i> Koil.
5.	Bertha Anastasha Subroto Putri (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2025). ³³	Praktik Jual Beli T-Shirt Bootleg Pada Band Teenage Death Star Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Kasus di Toko	Penelitian ini membahas mengenai Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis tentang Praktik Jual Beli T-Shirt Bootleg Pada Band Teenage Death Star. Sedangkan penulis meneliti mengenai perlindungan

³² Ona Nalea, *Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Hak-Hak Penerima Lisensi Merek* (Skripsi, Universitas Islam Kalimantan, 2024), Melalui: <<https://eprints.uniska-bjm.ac.id/22921/1/ONANALEACovAbsDaf.pdf>>

³³ Bertha Anastasha Subroto Putri, *Praktik Jual Beli T-Shirt Bootleg Pada Band Teenage Death Star Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Di Toko Uls.Clothing Pada Aplikasi TikTok Shop)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2025), Melalui: <<https://digilib.uinsgd.ac.id/108064.>>

		Uls.Clothing Pada Aplikasi TikTok Shop)	hukum terhadap pemegang hak merek akibat pemalsuan <i>merchandise</i> Koil.
--	--	---	---

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap perlindungan hukum terhadap pemegang merek dari kalangan industri kreatif (musik) dalam konteks perdagangan digital (lokapasar). Penelitian ini menggali fenomena pemalsuan *merchandise* grup musik Koil yang diperjualbelikan tanpa izin di marketplace, memperlihatkan kesenjangan antara pengaturan hukum dan dinamika digital. Kajian ini melibatkan pendekatan normatif sekaligus mencermati kondisi empiris di *e-commerce*, sehingga memperkaya literatur perlindungan merek di ranah ekonomi kreatif yang masih minim diteliti secara hukum.

Penelitian berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Obat Cina Atas Kesamaan Pada Pokoknya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Putusan Nomor 55/Pdt.Sus-Merek/2020/Pn Niaga.Jkt.Pst)” berfokus pada persoalan kesamaan merek pada pokoknya dalam ranah hukum positif, dengan objek analisis berupa produk farmasi tradisional. Kebaruan terletak pada pendalaman terhadap interpretasi hakim dalam menentukan batas kesamaan merek dalam konteks yuridis.

Penelitian berjudul "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Merek atas Pemalsuan Sepatu "Ortuseight" Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis”, masih terbatas pada aspek fisik

perdagangan dan pasar konvensional, sedangkan penelitian penulis telah menjangkau isu pemalsuan di marketplace yang cenderung lebih kompleks dan aktual dalam dunia digital.

Penelitian berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Terkenal di Luar Negeri atas Penggunaan Merek “100%” Sama di Indonesia (studi putusan no 22/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN.Niaga. Jkt.Pst)” menyoroti konflik antara sistem *first to file* Indonesia dan prinsip perlindungan reputasi global. Bila dibandingkan dengan penelitian penulis yang menyoroti pelanggaran terhadap merek lokal dalam sektor musik, skripsi ini lebih mengarah pada dimensi internasional dan globalisasi merek, bukan digitalisasi perdagangan.

Penelitian berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Hak-Hak Penerima Lisensi Merek” menelaah hubungan kontraktual dan posisi hukum pihak ketiga dalam sistem lisensi. Berbeda dari penelitian penulis yang berfokus pada pelanggaran langsung oleh pihak yang tidak berizin di *marketplace*, penelitian ini menitikberatkan pada relasi hukum antara pemegang hak dan penerima lisensi, bukan pada isu digital atau *e-commerce*.

Penelitian berjudul "Praktik Jual Beli T-Shirt Bootleg Pada Band Teenage Death Star Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Kasus di Toko Uls.Clothing Pada Aplikasi TikTok Shop)", menggunakan pendekatan interdisipliner, yaitu menggabungkan perspektif hukum ekonomi syariah dengan hukum merek dalam menilai praktik jual beli *t-shirt bootleg* dari *band indie*.

Penelitiannya juga menyoroti TikTok Shop sebagai media penjualan, serupa dengan penelitian penulis yang mengangkat fenomena lokapasar. Namun, penelitian ini menambahkan dimensi etika agama, sedangkan penelitian penulis tetap berada dalam kerangka hukum positif nasional.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap perlindungan hak merek dalam sektor industri kreatif, khususnya grup musik, dengan konteks pelanggaran yang terjadi di *platform* lokapasar digital (*e-commerce*). Dibandingkan dengan penelitian yang lainnya masing-masing menyoroti aspek kesamaan merek pada pokoknya (produk obat), pemalsuan barang fisik merek lokal (sepatu), perlindungan merek terkenal asing, hak penerima lisensi, dan pendekatan syariah atas penjualan *bootleg*. Penulis menggunakan pendekatan baru dengan mengangkat isu pemalsuan *merchandise* musisi sebagai fenomena kontemporer yang belum banyak dikaji secara yuridis, serta menekankan pentingnya tanggung jawab *platform* digital dalam mencegah pelanggaran merek. Pendekatan ini relevan dengan perkembangan teknologi perdagangan dan eksploitasi hak kekayaan intelektual di ruang digital, yang tidak tersentuh secara spesifik dalam penelitian pembandingan.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap yang sistematis dan terstruktur untuk memastikan bahwa proses dan hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Berikut adalah langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analitis.³⁴ Yang merupakan adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Dengan tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran atau suatu deskripsi dari peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan bersamaan dengan praktik pelaksanaan hukum empiris yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Metode deskriptif analitis untuk menyajikan realitas kasus yang terjadi (pemalsuan *merchandise* Koil) dan menganalisis perlindungan hukumnya secara normatif dan empiris berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan pendekatan ini, penelitian dilakukan tidak hanya menjelaskan masalah, tetapi juga memberikan evaluasi dan interpretasi hukum secara mendalam.³⁵

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji peraturan hukum terkait pemalsuan *merchandise* Koil dalam perdagangan pada berbagai lokapasar khususnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sementara pendekatan empiris digunakan

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986). hlm. 10.

³⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990). hlm. 97-98.

untuk menganalisis hukum berdasarkan data dari hasil melakukan observasi lapangan dan juga mewawancarai narasumber yang berkaitan dengan permasalahan pemalsuan *merchandise* grup musik Koil.³⁶

3. Sumber dan Jenis Data

Adapun sumber data dan jenis data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data

Secara umum, penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber datanya menjadi dua jenis. Data yang dikumpulkan secara langsung dan data yang bersumber dari pustaka. Data yang dikumpulkan secara langsung disebut sebagai data primer, yaitu data utama yang menjadi fondasi utama dalam penelitian. Sementara itu, data yang berasal dari literatur atau sumber pustaka termasuk dalam data sekunder, yang berperan sebagai data pelengkap atau pembanding untuk mendukung proses analisis dalam penelitian. Adapun data tersebut mencakup antara lain:

1) Sumber Data Primer

Pendekatan pengumpulan data ini dilakukan secara langsung melalui wawancara dengan para narasumber.³⁷ Peneliti menggunakan kombinasi wawancara terstruktur dan tidak

³⁶ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2013). hlm. 24.

³⁷ Sutiyoso Bambang, *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2018). hlm. 27.

terstruktur untuk mengumpulkan data, yang kemudian digabungkan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dari narasumber.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah referensi yang mendukung penulis dalam menganalisis data primer seperti buku-buku, jurnal ataupun publikasi pemerintah yang mencakup dokumen-dokumen resmi yang menyajikan substansi mengenai penerapan hukum oleh para ahli hukum. Data sekunder terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 5) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup berbagai jenis sumber seperti jurnal akademik, buku referensi, artikel, dan publikasi lain yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini. Sumber-sumber tersebut berperan penting dalam memberikan wawasan tambahan, landasan teoretis, serta analisis kritis terhadap isu yang diangkat. Selain itu, bahan hukum sekunder turut membantu peneliti dalam memahami prinsip-prinsip hukum, dinamika pemikiran ilmiah, dan penafsiran terhadap peraturan yang relevan, sehingga mampu memperkuat landasan analisis dan argumen dalam membahas perlindungan hukum bagi pemegang hak merek atas pemalsuan *merchandise* grup musik Koil.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan panduan atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, sumber online, ensiklopedia, dan lain-lain yang relevan. Sehingga mampu memperkuat landasan analisis dan argumen dalam membahas perlindungan hukum bagi pemegang hak merek atas pemalsuan *merchandise* grup musik Koil.

3) Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah jenis publikasi yang merangkum informasi dari sumber primer maupun sekunder. Data ini digunakan untuk menyajikan pemahaman secara umum tentang suatu topik, konsep, atau peristiwa. Dalam penelitian ini, sumber data tersier yang digunakan meliputi kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

b. Jenis Data

Penulisan hukum ini mengadopsi pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis, yang merupakan uraian dan informasi verbal yang diperoleh dari responden dalam bentuk tulisan atau lisan mengenai perilaku nyata. Metode penelitian kualitatif dirancang untuk mempelajari kehidupan manusia dalam situasi yang terbatas dan kasuistik, tetapi dengan kedalaman yang menyeluruh, tanpa mengurangi aspek-aspeknya yang eksklusif.³⁸ Dalam penelitian ini, penulis menyajikan deskripsi yang sistematis dan rinci berdasarkan informasi yang diperoleh langsung dari hasil observasi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan pemegang hak merek.

³⁸ Burham Ashshofa, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001). hlm. 54.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah studi kepustakaan, studi lapangan dan studi dokumen, adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan (*library research*), merupakan jenis penelitian yang didasarkan pada sumber-sumber informasi seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

b. Studi Lapangan

Peneliti melakukan pengumpulan data lapangan dengan menggunakan dua (2) metode, diantaranya:

1) Observasi

Observasi adalah proses pengumpulan data di mana peneliti melakukan pengamatan terhadap fenomena yang sedang diteliti.

2) Wawancara

Wawancara adalah metode untuk mendapatkan informasi dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden. Dalam penelitian ini, penulis memperkuat bukti dengan melakukan wawancara kepada staf Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat bagian Kekayaan Intelektual, serta staf ahli dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu wawancara kepada grup musik Koil selaku pemegang hak cipta.

c. Studi Dokumen

Pendekatan ini melibatkan penggunaan sumber hukum tertulis seperti buku atau literatur lainnya yang relevan untuk mengeksplorasi suatu masalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu informasi dari berbagai sumber kepustakaan yang berkaitan dengan usaha untuk melindungi hukum pemegang hak merek.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu tahapan yang dilakukan setelah data terkumpul. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan akan dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menganalisis data yang diperoleh menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.³⁹

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti adalah menganalisis data dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi data, data yang telah terkumpulkan dari peraturan-peraturan yang berlaku;
- b. Klasifikasi data, setelah data diidentifikasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti kemudian diklasifikasi;

³⁹ Made Wirartha and Dhewiberta Hardjono, *Pedoman Penulisan Ushulan Penelitian. Skripsi. Dan Tesis* (Yogyakarta: ANDI, 2006). hlm. 155.

- c. Analisis data, setelah data diklasifikasi kemudian dianalisis dengan metode yang ditentukan;
- d. Menyimpulkan, setelah melakukan analisis data maka selanjutnya menyimpulkan hasil penelitian.

6. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di beberapa lokasi, diantaranya:

a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- 2) Perpustakaan Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

b. Penelitian Lapangan

Yakni penelitian yang melibatkan investigasi langsung di lapangan untuk mencari solusi atas masalah yang ada. Berdasarkan topik yang dipilih oleh penulis, penelitian dilakukan pada:

- 1) Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Jl. H. R. Rasuna Said No.kav 8 9, RT.16/RW.4, Kuningan, Kuningan Timur, Jakarta, Kota Jakarta Selatan, 12940.
- 2) Kantor Grup Musik Koil, Jl. Cihapit No.4, Cihapit, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat, 4011.